

RENCANA KERJA PERUBAHAN



**DINAS PERTANIAN
KABUPATEN KLUNGKUNG
TAHUN 2021**

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Pertanian Tahun 2021 adalah perencanaan tahunan Dinas Pertanian sebagai pelaksanaan dan penjabaran Perencanaan Strategis (Renstra) Dinas Pertanian yang memuat target kinerja, tujuan dan sasaran yang dicapai melalui pelaksanaan program kegiatan.

Rencana kerja menggambarkan kegiatan tahunan sebagai bentuk komitmen Dinas Pertanian dalam pelaksanaan pembangunan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sesuai dengan indikator kinerja beserta target-targetnya berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis

Atas kerjasama semua pihak, akhirnya Renja Perubahan Dinas Pertanian Kabupaten Klungkung Tahun 2021 dapat disusun dan menjadi pedoman serta acuan bagi pelaksanaan pembangunan pertanian di Kabupaten Klungkung periode 2021.

KEPALA DINAS PERTANIAN
KABUPATEN KLUNGKUNG


drh. Ida Bagus Gede Juanida.

Pembina Utama Muda

NIP. 19660603 199903 1 007

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Sistematika Penulisan	5
BAB II. EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021	6
2.1. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Sampai Triwulan II	6
2.1.1. Capaian Sasaran Renja Tahun 2021	6
2.1.2. Capaian Program dan Kegiatan Renja Tahun 2021	6
2.2. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pertanian	21
BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	27
3.1. Tujuan dan Sasaran	27
3.1.1. Tujuan.....	27
3.1.2. Sasaran.....	28
3.2. Program dan Kegiatan	29
BAB IV. PENUTUP	30

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Capaian Kinerja Sasaran Sampai Bulan Juni Tahun 2021	6
Tabel 2.2.	Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub-Kegiatan Renja per Triwulan II Tahun 2021	7
Tabel 2.3.	Capaian kinerja outcome/output pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.....	13
Tabel 2.4.	Capaian kinerja outcome/output pada Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian.....	15
Tabel 2.5.	Capaian kinerja outcome/output pada Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	16
Tabel 2.6.	Capaian kinerja outcome/output pada Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	18
Tabel 2.7.	Capaian kinerja outcome/output pada Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	19
Tabel 2.8.	Capaian kinerja outcome/output pada Program Penyuluhan Pertanian.....	20
Tabel 2.9.	Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Pertanian Kabupaten Klungkung	26
Tabel 3.1.	Tujuan Dinas Pertanian Tahun 2021	27
Tabel 3.2.	Sasaran Dinas Pertanian Tahun 2021	28
Tabel 3.3.	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Pertanian Kabupaten Klungkung dalam APBD Tahun 2021 dan Rencana Perubahan Tahun 2021	24

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan	14
Gambar 2.2. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian.....	15
Gambar 2.3. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	17
Gambar 2.4. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	18
Gambar 2.5. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	19
Gambar 2.6. Program Penyuluhan Pertanian.....	20

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KLUNGKUNG
NOMOR 54 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 65 TAHUN 2020 TENTANG
PENETAPAN RENCANA KERJA DINAS
PERTANIAN KABUPATEN KLUNGKUNG
TAHUN 2021

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Pertanian adalah perencanaan perubahan tahunan sebagai pelaksanaan dan penjabaran Perencanaan Strategis (Renstra) yang memuat target kinerja tujuan dan sasaran Dinas Pertanian yang dicapai melalui pelaksanaan program kegiatan. Penyusunan Renja Perubahan Dinas Pertanian dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah, Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana kerja perubahan menggambarkan perubahan /efisiensi kegiatan induk sebagai bentuk komitmen Dinas Pertanian dalam keberlanjutan pelaksanaan pembangunan pertanian dari Renja sebelumnya dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang sesuai dengan indikator kinerja beserta target-targetnya berdasarkan program, kebijakan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Dokumen Rencana Kerja Perubahan Dinas Pertanian Kabupaten Klungkung Tahun 2021 disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klungkung tahun 2019 – 2023 dan Rencana Strategis Dinas Pertanian Kabupaten Klungkung Tahun 2019 – 2023.

1.2 Dasar Hukum

Peraturan perundang-undangan yang dijadikan landasan hukum dalam penyusunan Renja Perubahan Dinas Pertanian Kabupaten Klungkung Tahun 2021, adalah sebagai berikut :

1. Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah–daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah–daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2015-2019;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah, Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
13. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Bali Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 15);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 5);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klungkung Tahun 2013 – 2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 6);
18. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 25 tahun 2021 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 91 tahun 2020 tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah Tahun Anggaran 2021 (berita daerah Kabupaten Klungkung tahun 2021 nomor 26);

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Maksud penyusunan Renja Perubahan Dinas Pertanian Kabupaten Klungkung Tahun 2021 adalah sebagai arah, pedoman dan penyesuaian kegiatan dalam penyelenggaraan pembangunan urusan bidang pertanian di Kabupaten Klungkung dalam kurun waktu 1 tahun sehingga pelaksanaan pembangunan urusan terkait bisa dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan.

1.3.2. Tujuan

Renja Perubahan Dinas Pertanian Kabupaten Klungkung Tahun 2021 disusun dengan tujuan untuk:

- a. Menjabarkan Tujuan dan Sasaran Dinas Pertanian Kabupaten Klungkung ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2021;
- b. Menetapkan berbagai program dan kegiatan prioritas yang disertai dengan indikasi perubahan pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2021.

Mengacu pada maksud dan tujuan tersebut, maka Renja Perubahan Dinas Pertanian Kabupaten Klungkung Tahun 2021 dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan RKA/DPA Perubahan tahun anggaran 2021 untuk urusan yang sama.

1.4 Sistematika Penulisan

Penyusunan Renja Perubahan Dinas Pertanian Kabupaten Klungkung Tahun 2021 diawali dengan analisis kondisi kegiatan semester II tahun berjalan, yang menyangkut hasil yang telah dicapai dan masalah serta tantangan yang dihadapi, kemudian dilakukan identifikasi lingkungan internal dan eksternal. Perumusan tujuan dan sasaran analisis kondisi yang diharapkan, isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Pertanian Kabupaten Klungkung.

Rencana Kerja Perubahan Dinas Pertanian Kabupaten Klungkung Tahun 2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

memuat tentang latar belakang perubahan Renja, dasar hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II EVALUASI RENJA BAPERLITBANG TAHUN 2021

memuat tentang hasil analisis gambaran pelayanan perangkat daerah, analisis hasil pengendalianpelaksanaan renja sampai dengan Triwulan II dan penentuan isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

memuat tentang penjelasan perubahan-perubahan pada program dan kegiatan dan pendanaan program kegiatan.

BAB IV PENUTUP

memuat tentang catatan penting perubahan renja dan kaidah pelaksanaan perubahan renja.

BAB II

EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH 2021

2.1. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Sampai Triwulan II

Berdasarkan evaluasi hasil pelaksanaan Renja Distan sampai dengan triwulan II, diperoleh gambaran sebagai berikut :

2.1.1. Capaian Sasaran Renja Tahun 2021

Pengukuran kinerja dilakukan terhadap kinerja kegiatan dan kinerja sasaran. Hasil pengukuran kinerja terhadap 4 indikator sasaran sampai bulan Juni 2021 ditunjukkan pada tabel berikut ini :

Tabel 2.1 Capaian Kinerja Sasaran Sampai Bulan Juni Tahun 2021

No	Sasaran	Indikator sasaran	Target	Realisasi	Capaian kinerja
1	Meningkatnya produktivitas pertanian	Produktivitas padi (Kw/Ha)	61,79	0	0
		Produktivitas jagung (Kw/Ha)	31,76	0	0
		Produktivitas kedelai (Kw/Ha)	13,01	0	0
		Jumlah populasi ternak sapi (ekor)	42.899	0	0

Untuk produktivitas tanaman pangan (padi, jagung dan kedelai) capaian masih 0 karena dihitung pertahun oleh karena pola tanam dihitung dalam setahun yang disesuaikan dengan pola musim tanam. Sementara itu, capaian populasi ternak sapi sampai bulan Juni masih 0, karena masih dalam proses penghitungan.

2.1.2. Capaian Program dan Kegiatan Renja Tahun 2021:

Hasil evaluasi Renja Dinas Pertanian Kabupaten Klungkung per triwulan II adalah sebagaimana tabel di bawah ini

Tabel 2.2. Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub-Kegiatan Renja per Triwulan II Tahun 2021

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan(Output)	Target Kinerja & Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi 2021		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja & Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja & Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2021)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket.
									I		II									
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	26	27
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN															
3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN															
3	27	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA (DPA)	Indeks Reformasi Birokrasi (DPA)	18,00	11.302.823.785,00	17,83	2.594.093.462,00	0,00	2.279.354.666,00	17,83	4.873.448.128,00			17,83	4.873.448.128,00	Kepala Dinas	
3	27	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (DPA)	Persentase Hasil Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti (DPA)	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	630.000,00	100,00	630.000,00			100,00	630.000,00	Kepala Dinas	
3	27	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (DPA)	Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah Tepat Waktu (DPA)	12,00	0,00	4,00	0,00	0,00	420.000,00	4,00	420.000,00			4,00	420.000,00	Kepala Dinas	
3	27	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (DPA)	Tersusunnya Laporan Evaluasi Perangkat Daerah (DPA)	9,00	0,00	10,00	0,00	5,00	210.000,00	15,00	210.000,00			15,00	210.000,00	Kepala Dinas	
3	27	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (DPA)	Tersusunnya Laporan Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah Tepat Waktu (DPA)	3,00	10.494.744.633,00	1,00	2.425.375.626,00	0,00	2.140.052.482,00	1,00	4.565.428.108,00			1,00	4.565.428.108,00	Kepala Dinas	
3	27	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (DPA)	Terpenuhinya Kebutuhan Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN (DPA)	100,00	10.494.744.633,00	100,00	2.425.375.626,00	0,00	2.139.552.482,00	100,00	4.564.928.108,00			100,00	4.564.928.108,00	Kepala Dinas	
3	27	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (DPA)	Tersusunnya Jumlah Laporan Keuangan Bulanan dan Semesteran Tepat Waktu (DPA)	14,00	0,00	3,00	0,00	2,00	500.000,00	5,00	500.000,00			5,00	500.000,00	Kepala Dinas	
3	27	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (DPA)	Tingkat Disiplin Aparatur (DPA)	95,00	0,00	99,08	210.000,00	-0,97	0,00	98,11	210.000,00			98,11	210.000,00	Kepala Dinas	
3	27	1	2.05	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (DPA)	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Kepegawaian Tepat Waktu (DPA)	100,00	0,00	100,00	210.000,00			100,00	210.000,00			100,00	210.000,00	Kepala Dinas	
3	27	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah (DPA)	Persentase Surat yang Diarsipkan Sesuai Klasifikasi (DPA)	100,00	808.079.152,00	100,00	168.507.836,00	0,00	138.672.184,00	100,00	307.180.020,00			100,00	307.180.020,00	Kepala Dinas	

3	27	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (DPA)	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur (DPA)	85,00	808.079.152,00	12,12	168.507.836,00	4,24	138.462.184,00	16,36	306.970.020,00			16,36	306.970.020,00	Kepala Dinas	
3	27	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (DPA)	Cakupan Pemenuhan Layanan Jasa Surat Menyurat (DPA)	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	210.000,00	100,00	210.000,00			100,00	210.000,00	Kepala Dinas	
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)																				
Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan																				
3	27	2			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN (RENJA)	Cakupan Pemenuhan Sarana Pertanian (RENJA)	100,00	1.393.215.156,00	62,91	79.160.266,00	-43,35	117.024.266,00	19,56	196.184.532,00	19,56	14,08	19,56	196.184.532,00	Kepala Bidang Produksi Peternakan	
3	27	2	2.01		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian (RENJA)	Persentase Luas Tanaman yang Menerapkan Teknologi Pertanian (RENJA)	50,28	493.607.952,00	12,76	9.830.542,00	8,53	12.170.542,00	21,29	22.001.084,00	21,17	4,46	21,29	22.001.084,00	Kepala Bidang Produksi Peternakan	
						Persentase Produksi olahan hasil pertanian (RENJA)	50,00		0,00		0,00		0,00							
3	27	2	2.01	1	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi (RENJA)	Persentase penerapan teknologi budidaya tanaman (RENJA)	49,88	374.612.500,00	49,06	960.000,00	0,28	420.000,00	49,34	1.380.000,00	98,92	0,37	49,34	1.380.000,00	Kepala Bidang Produksi Peternakan	
3	27	2	2.01	2	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian (RENJA)	Persentase kelompok tani yang menerapkan teknologi pasca panen (RENJA)	50,00	118.995.452,00	14,30	8.870.542,00	16,70	11.750.542,00	31,00	20.621.084,00	61,00	17,33	31,00	20.621.084,00	Kepala Bidang Produksi Peternakan	
						Persentase KWT yang melaksanakan pengolahan hasil pertanian (RENJA)	50,00		10,00		20,00		30,00				30,00			
3	27	2	2.03		Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak Serta Pakan Dalam Daerah Kabupaten/ Kota (RENJA)	Persentase induk sapi (akseptor) yang menggunakan teknologi IB (RENJA)	58,00	899.607.204,00	19,98	69.329.724,00	11,09	104.853.724,00	31,07	174.183.448,00	53,57	19,36	31,07	174.183.448,00	Kepala Bidang Produksi Peternakan	
3	27	2	2.03	1	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil (RENJA)	Jumlah Kelompok Ternak yang Melaksanakan Pembibitan Sapi (DPA)		855.177.204,00	1,00	69.329.724,00	3,00	69.329.724,00	4,00	138.659.448,00	0,00	16,21	4,00	138.659.448,00	Kepala Bidang Produksi Peternakan	
						Tersedianya laporan pengawasan mutu benih/bibit ternak (RENJA)	12,00		0,00		0,00		0,00							
3	27	2	2.03	2	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak (RENJA)	Jumlah Kelompok yang Menerapkan Teknologi Pakan Ternak (DPA)		44.430.000,00	1,00	0,00	2,00	35.524.000,00	3,00	35.524.000,00	0,00	79,95	3,00	35.524.000,00	Kepala Bidang Produksi Peternakan	
						Tersedianya laporan pengawasan peredaran bahan pakan/pakan/hijauan pakan ternak (RENJA)	12,00		0,00		0,00		0,00							
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)															37,37	11,91				
Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan															SR	SR				

3	27	3			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN (RENJA)	Cakupan Pemenuhan Prasarana Pertanian (RENJA)	100,00	849.888.904,00	0,00	9.350.226,00	19,56	47.335.226,00	19,56	56.685.452,00	19,56	6,67	19,56	56.685.452,00	Kepala Bidang Produksi Peternakan	
3	27	3	2.01		Pengembangan Prasarana Pertanian (RENJA)	Persentase Penyediaan Prasarana Pertanian (DPA)		172.100.452,00	0,00	6.233.484,00	0,80	7.528.484,00	0,80	13.761.968,00	0,00	8,00	0,80	13.761.968,00	Kepala Bidang Produksi Peternakan	
						Persentase terlayannya permohonan kajian alih fungsi lahan (RENJA)	100,00		0,00		0,00		0,00							
3	27	3	2.01	2	Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B (RENJA)	Persentase Terlayannya Permohonan Kajian Alih Fungsi Lahan (DPA)		105.500.000,00	100,00	3.116.742,00	0,00	3.116.742,00	100,00	6.233.484,00	0,00	5,91	100,00	6.233.484,00	Kepala Bidang Produksi Peternakan	
						Tersedianya peta lahan pertanian berkelanjutan (RENJA)	100,00		0,00		0,00		0,00							
3	27	3	2.01	3	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya (RENJA)	Cakupan pemenuhan pupuk bersubsidi (RENJA)	85,00	66.600.452,00	44,56	3.116.742,00	37,41	4.411.742,00	81,97	7.528.484,00	48,85	11,30	81,97	7.528.484,00	Kepala Bidang Produksi Peternakan	
						Jumlah ternak sapi yang dijamin Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau (RENJA)	200,00		0,00		22,00		22,00							
						Persentase luas tanam yang dijamin Asuransi Usaha Tani Padi (RENJA)	60,00		5,55		17,91		23,46							
3	27	3	2.02		Pembangunan Prasarana Pertanian (RENJA)	Persentase prasarana pertanian yang dibangun dan dipelihara (RENJA)	100,00	615.298.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00	0,00	5,69	0,00	35.000.000,00	Kepala Bidang Produksi Peternakan	
3	27	3	2.02	1	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani (RENJA)	Persentase Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (RENJA)	100,00	90.042.400,00	0,00	0,00									Kepala Bidang Produksi Peternakan	
						Persentase Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani (DPA)			0,00											
3	27	3	2.02	2	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian (RENJA)	Persentase Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian (RENJA)	100,00		0,00	0,00								Kepala Bidang Produksi Peternakan		
3	27	3	2.02	3	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani (RENJA)	Persentase Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani (RENJA)	100,00	354.688.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00	8,46	0,00	30.000.000,00	Kepala Bidang Produksi Peternakan	
3	27	3	2.02	4	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit (RENJA)	Persentase Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit (DPA)			0,00	0,00									Kepala Bidang Produksi Peternakan	
						Persentase Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit (RENJA)	100,00		0,00											

3	27	3	2.02	5	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Long Storage (RENJA)	Persentase Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Long Storage (RENJA)	100,00		0,00	0,00								Kepala Bidang Produksi Peternakan		
3	27	3	2.02	6	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air (RENJA)	Persentase Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air (RENJA)	100,00		0,00	0,00								Kepala Bidang Produksi Peternakan		
3	27	3	2.02	8	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya (RENJA)	Persentase Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya (RENJA)	100,00	154.717.600,00	0,00	0,00								Kepala Bidang Produksi Peternakan		
3	27	3	2.02	9	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya (RENJA)	Persentase Pemanfaatan Alat Alat dan Mesin Pertanian (RENJA)	100,00	15.850.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	31,55	0,00	5.000.000,00	Kepala Bidang Produksi Peternakan	
						Persentase Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya (DPA)		0,00	54,55	54,55	54,55									
3	27	3	2.03		Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota (RENJA)	Persentase Peningkatan Populasi Sapi (RENJA)	0,50	62.490.452,00	0,00	3.116.742,00	0,00	4.806.742,00	0,00	7.923.484,00	0,00	12,68	0,00	7.923.484,00	Kepala Bidang Produksi Peternakan	
3	27	3	2.03	1	Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak (RENJA)	Jumlah Kelompok Agribisnis Peternakan (RENJA)	15,00	62.490.452,00	1,00	3.116.742,00	2,00	4.806.742,00	3,00	7.923.484,00	20,00	12,68	3,00	7.923.484,00	Kepala Bidang Produksi Peternakan	
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)															8,79					
Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan															SR					
3	27	4			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER (RENJA)	Persentase Angka Kesakitan Hewan (RENJA)	10,00	466.997.452,00	0,00	39.711.626,00	0,00	31.421.626,00	0,00	71.133.252,00	0,00	15,23	0,00	71.133.252,00	Kepala Bidang Kesehatan Hewan	
						Persentase Daging Ternak yang Aman dan Layak Dikonsumsi (RENJA)	100,00		0,00		0,00		0,00							
3	27	4	2.01		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota (RENJA)	Persentase Hewan/Ternak yang Memperoleh Pelayanan Kesehatan Hewan (RENJA)	10,00	239.606.452,00	100,00	34.861.626,00	0,00	27.611.626,00	100,00	62.473.252,00	1.000,00	26,07	100,00	62.473.252,00	Kepala Bidang Kesehatan Hewan	
3	27	4	2.01	1	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis (RENJA)	Jumlah Hewan/Ternak yang Memperoleh Pelayanan Kesehatan Hewan (RENJA)	19.967,00	239.606.452,00	3.378,00	34.861.626,00	3.996,00	27.611.626,00	7.374,00	62.473.252,00	36,93	26,07	7.374,00	62.473.252,00	Kepala Bidang Kesehatan Hewan	
3	27	4	2.02		Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota (RENJA)	Persentase Hewan/Ternak Terindikasi Berpenyakit Zoonosis yang diberantas (RENJA)	10,00	187.750.000,00	100,00	800.000,00	0,00	1.600.000,00	100,00	2.400.000,00	1.000,00	1,28	100,00	2.400.000,00	Kepala Bidang Kesehatan Hewan	

3	27	4	2.02	1	Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan (RENJA)	Persentase Hewan/Produk Hewan Terindikasi Penyakit Hewan Menular yang Diberantas (RENJA)	100,00	187.750.000,00	0,00	800.000,00	0,00	1.600.000,00	0,00	2.400.000,00	0,00	1,28	0,00	2.400.000,00	Kepala Bidang Kesehatan Hewan	
						Persentase Hewan/Ternak yang Terindikasi Berpenyakit Hewan (DPA)			5,28		-0,37		4,91				4,91			
3	27	4	2.04		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner (DPA)	Cakupan Produsen Pangan Hewani yang Dipantau (DPA)		0,00	100,00	4.050.000,00	0,00	2.210.000,00	100,00	6.260.000,00			100,00	6.260.000,00	Kepala Bidang Kesehatan Hewan	
3	27	4	2.04	2	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan (DPA)	Persentase Produsen Pangan Hewani yang Dipantau (DPA)		0,00	100,00	4.050.000,00	0,00	2.210.000,00	100,00	6.260.000,00			100,00	6.260.000,00	Kepala Bidang Kesehatan Hewan	
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)															666,67	9,12				
Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan															ST	SR				
3	27	5			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN (RENJA)	Cakupan Luas Pengendalian OPT yang ditangani (RENJA)	100,00	437.813.500,00	23,10	2.880.000,00	21,60	1.440.000,00	44,70	4.320.000,00	44,70	0,99	44,70	4.320.000,00	Kepala Bidang Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	
3	27	5	2.01		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota (RENJA)	Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian yang dilakukan (RENJA)	10,00	437.813.500,00	2,31	2.880.000,00	2,16	1.440.000,00	4,47	4.320.000,00	44,70	0,99	4,47	4.320.000,00	Kepala Bidang Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	
3	27	5	2.01	1	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (RENJA)	Luas Pengendalian OPT yang ditangani (RENJA)	587,00	437.813.500,00	136,00	2.880.000,00	127,00	1.440.000,00	263,00	4.320.000,00	44,80	0,99	263,00	4.320.000,00	Kepala Bidang Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)															44,70	0,99				
Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan															SR	SR				
3	27	7			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN (RENJA)	Jumlah SDM Pertanian Berprestasi di Tingkat Provinsi (RENJA)	2,00	287.210.536,00	0,00	2.340.000,00	0,00	18.252.063,00	0,00	20.592.063,00	0,00	7,17	0,00	20.592.063,00	Kepala Bidang Pengembangan dan Pemberdayaan SDM	
3	27	7	2.01		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian (RENJA)	Persentase Terlaksananya Penyuluhan Pertanian (DPA)		287.210.536,00	92,93	2.340.000,00	6,69	18.252.063,00	99,62	20.592.063,00	0,00	7,17	99,62	20.592.063,00	Kepala Bidang Pengembangan dan Pemberdayaan SDM	
						Persentase Terlaksananya Penyuluh Pertanian (RENJA)	100,00		0,00		0,00		0,00				0,00			
3	27	7	2.01	1	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa (RENJA)	Persentase Penyuluh dengan NEM baik (RENJA)	100,00	138.018.000,00	0,00	0,00									Kepala Bidang Pengembangan dan Pemberdayaan SDM	

3	27	7	2.01	2	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa (RENJA)	Persentase peningkatan kelas kemampuan kelompok (RENJA)	20,00	97.138.600,00	0,00	2.340.000,00	0,00	10.494.063,00	0,00	12.834.063,00	0,00	13,21	0,00	12.834.063,00	Kepala Bidang Pengembangan dan Pemberdayaan SDM	
3	27	7	2.01	3	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian (RENJA)	Tersedianya Data Sarana Prasarana Penyuluhan (RENJA)	1,00	10.240.000,00	0,00	0,00	0,00	6.813.000,00	0,00	6.813.000,00	0,00	66,53	0,00	6.813.000,00	Kepala Bidang Pengembangan dan Pemberdayaan SDM	
3	27	7	2.01	4	Pembentukan Badan Usaha Milik Petani (RENJA)	Jumlah penumbuhan badan usaha milik petani (RENJA)	1,00	41.813.936,00	0,00	0,00	0,00	945.000,00	0,00	945.000,00	0,00	2,26	0,00	945.000,00	Kepala Bidang Pengembangan dan Pemberdayaan SDM	
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)																7,17				
Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan																SR				
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM DI BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN								14.737.949.333,00		2.727.535.580,00		2.494.827.847,00		5.222.363.427,00				5.222.363.427,00		
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Program Bidang Urusan (%)															13,97	7,36				
Predikat Kinerja Program Bidang Urusan															SR	SR				
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM DI DINAS PERTANIAN								14.737.949.333,00		2.727.535.580,00		2.494.827.847,00		5.222.363.427,00				5.222.363.427,00		
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Program (%)															13,97	7,36				
Predikat Kinerja Dari Seluruh Program															SR	SR				

Pelaksanaan bidang urusan Pertanian dalam Renja Dinas Pertanian Kabupaten Klungkung Tahun 2021 dirancang dalam 6 program, 14 kegiatan dan 30 Sub-kegiatan. Capaian target kinerja program kegiatan Dinas Pertanian Kabupaten Klungkung pada Triwulan II Tahun 2021, untuk capaian rata-rata program sebesar 13,97% (Sangat Rendah) dan Capaian keuangan adalah 7,36% (Sangat Rendah) atau realisasi Rp. 5.222.363.427,00 dari pagu sebesar Rp. 14.737.949.333,00. Adapun penjelasan capaian kinerja program adalah sebagai berikut :

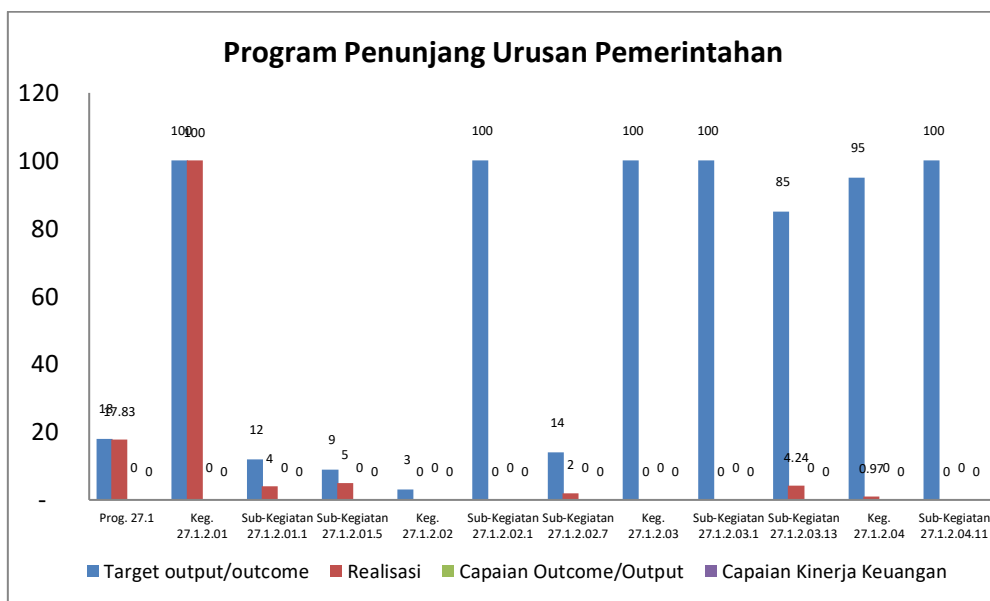
a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah diukur dengan indikator Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah dengan capaian kinerja outcome program sebesar 0,00%. Berdasarkan rekomendasi hasil evaluasi, terdapat beberapa hal yang masih harus diperbaiki untuk meningkatkan pelaksanaan reformasi birokrasi pada Dinas Pertanian, yaitu pada area manajemen perubahan, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Sedangkan kinerja keuangan program per Triwulan II mencapai 0,00% dari. Program Pelayanan Kesekretariatan didukung dengan pelaksanaan 4 (empat) kegiatan dan 7 (tujuh) sub-kegiatan, dengan rata-rata kinerja kegiatan mencapai 0,00% (Sangat Rendah) dan kinerja keuangan mencapai 0,00% (Sangat Rendah).

Tabel 2.3. Capaian kinerja outcome/output pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah adalah sebagaimana gambar di bawah ini :

	Target output/ outcome	Realisasi	Capaian Outcome/ Output	Capaian Kinerja Keuangan
Prog. 27.1	18	17.83	0	0
Keg. 27.1.2.01	100	100	0	0
Sub-Kegiatan 27.1.2.01.1	12	4	0	0
Sub-Kegiatan 27.1.2.01.5	9	5	0	0
Keg. 27.1.2.02	3	0	0	0
Sub-Kegiatan 27.1.2.02.1	100	0	0	0
Sub-Kegiatan 27.1.2.02.7	14	2	0	0

Keg. 27.1.2.03	100	0	0	0
Sub-Kegiatan 27.1.2.03.1	100	0	0	0
Sub-Kegiatan 27.1.2.03.13	85	4.24	0	0
Keg. 27.1.2.04	95	0.97	0	0
Sub-Kegiatan 27.1.2.04.11	100	0	0	0



Faktor penghambat capaian kinerja keuangan disebabkan oleh adanya wabah Pandemi Covid-19 yang mengakibatkan Rencana kerja reformasi birokrasi yang telah disusun belum sepenuhnya dapat dilaksanakan Secara optimal.

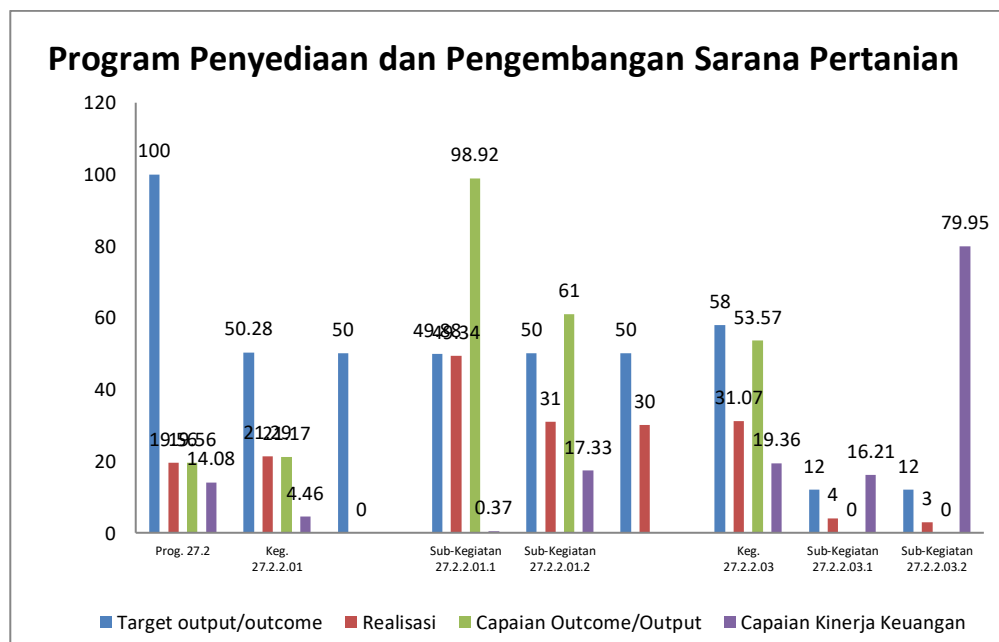
b. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian

Kinerja outcome Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian diukur dengan indikator kinerja Cakupan Pemenuhan Sarana Pertanian. kinerja program per Triwulan II mencapai 19,56% (Sangat Rendah). Sedangkan kinerja keuangan program mencapai 14,08% (Sangat Rendah). Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian dengan pelaksanaan 2 (dua) kegiatan dan 4 (empat) sub-kegiatan dengan rata-rata kinerja output kegiatan sebesar 37,37% (Sangat Rendah) dan rata-rata kinerja keuangan sebesar 11,91% (Sangat Rendah). Faktor pendorong capaian kinerja output kegiatan adalah semakin meningkatnya kepatuhan perangkat daerah untuk menyampaikan laporan pengendalian dan evaluasi sebagai bahan verifikasi oleh bidang. Sedangkan Faktor penghambat

capaian kinerja keuangan disebabkan oleh adanya wabah Pandemi Covid-19 yang mengakibatkan Rencana kerja reformasi birokrasi yang telah disusun belum sepenuhnya dapat dilaksanakan Secara optimal.

Tabel 2.4. Capaian kinerja outcome/output pada Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian adalah sebagaimana gambar di bawah ini:

	Target output/outcome	Realisasi	Capaian Outcome/ Output	Capaian Kinerja Keuangan
Prog. 27.2	100	19.56	19.56	14.08
Keg. 27.2.2.01	50.28	21.29	21.17	4.46
	50	0		
Sub-Kegiatan 27.2.2.01.1	49.88	49.34	98.92	0.37
Sub-Kegiatan 27.2.2.01.2	50	31	61	17.33
	50	30		
Keg. 27.2.2.03	58	31.07	53.57	19.36
Sub-Kegiatan 27.2.2.03.1	12	4	0	16.21
Sub-Kegiatan 27.2.2.03.2	12	3	0	79.95



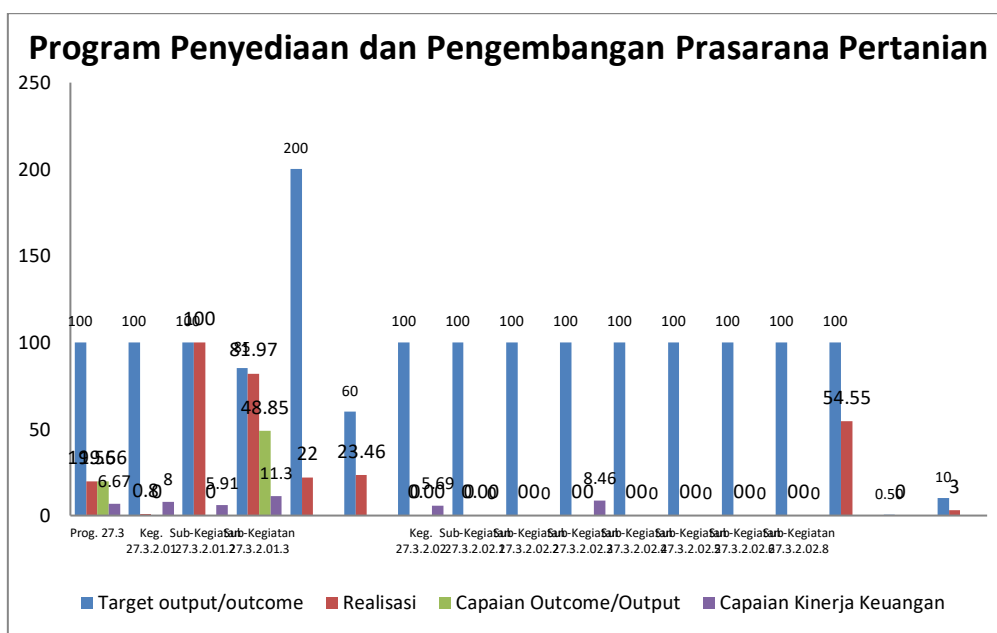
c. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian

Kinerja outcome Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian diukur dengan indikator kinerja yaitu Cakupan Pemenuhan Prasarana Pertanian. Sampai Triwulan II, capaian kinerja outcome program sebesar 19,56% (Sangat Rendah). Sedangkan kinerja keuangan program mencapai 6,67% (Sangat Rendah). Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian dengan pelaksanaan 3 (tiga) kegiatan dan 11 (sebelas) sub-kegiatan dengan rata-rata kinerja output kegiatan sebesar 0,0% (Sangat Rendah) dan rata-rata kinerja keuangan sebesar 8,79% (Sangat Rendah). Faktor penghambat capaian kinerja output kegiatan adalah adanya wabah Covid-19 yang mengakibatkan Rencana kerja reformasi birokrasi yang telah disusun belum sepenuhnya dapat dilaksanakan dengan optimal.

Tabel 2.5. Capaian kinerja outcome/output pada Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian adalah sebagaimana gambar di bawah ini :

	Target output/outcome	Realisasi	Capaian Outcome/ Output	Capaian Kinerja Keuangan
Prog. 27.3	100	19.56	19.56	6.67
Keg. 27.3.2.01	100	0.8	0	8
Sub-Kegiatan 27.3.2.01.2	100	100	0	5.91
Sub-Kegiatan 27.3.2.01.3	85	81.97	48.85	11.3
	200	22		
	60	23.46		
Keg. 27.3.2.02	100	0	0.00	5.69
Sub-Kegiatan 27.3.2.02.1	100	0	0.00	0
Sub-Kegiatan 27.3.2.02.2	100	0	0	0
Sub-Kegiatan 27.3.2.02.3	100	0	0	8.46
Sub-Kegiatan 27.3.2.02.4	100	0	0	0
Sub-Kegiatan 27.3.2.02.5	100	0	0	0
Sub-Kegiatan 27.3.2.02.6	100	0	0	0

Sub-Kegiatan 27.3.2.02.8	100	0	0	0
Sub-Kegiatan 27.3.2.02.9	100	54.55	0	31.55
Keg. 27.3.2.03	0.50	0	0	12.68
Sub-Kegiatan 27.3.2.03.1	10	3	20	12.68



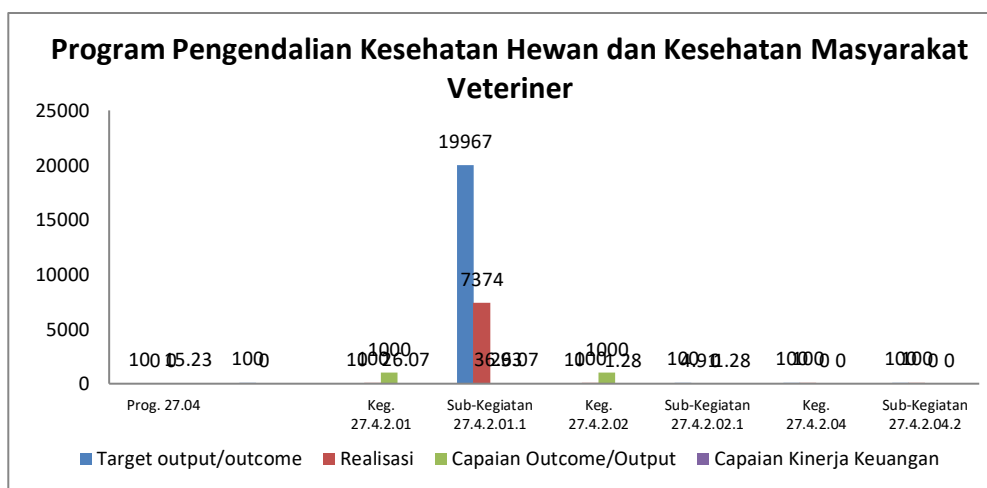
d. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Kinerja outcome Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner diukur dengan dua indikator kinerja yaitu Persentase Angka Kesakitan Hewan dan Persentase Daging Ternak yang Aman dan Layak Dikonsumsi. Sampai Triwulan II, capaian kinerja outcome program sebesar 0,00% (Sangat Rendah). Sedangkan kinerja keuangan program 8,79% (Sangat Rendah). Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner didukung dengan 3 (tiga) kegiatan dan 3 (tiga) sub-kegiatan dengan rata-rata kinerja output kegiatan sebesar 666.67% (Sangat Tinggi) dan rata-rata kinerja keuangan sebesar 9,12% (Sangat Rendah). Faktor pendorong capaian kinerja output kegiatan adalah semakin meningkatnya kepatuhan perangkat daerah untuk menyampaikan laporan pengendalian dan evaluasi sebagai bahan verifikasi oleh bidang. Sedangkan faktor penghambat capaian kinerja keuangan disebabkan oleh belum

optimalnya pelaksanaan koordinasi penyusunan perencanaan, pengendalian dan evaluasi rencana kerja perangkat daerah dan adanya wabah pandemi Covid-19.

Tabel 2.6. Capaian kinerja outcome/output pada Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner adalah sebagaimana gambar di bawah ini:

	Target output/outcome	Realisasi	Capaian Outcome/Output	Capaian Kinerja Keuangan
Prog. 27.04	10	0	0	15.23
	100	0		
Keg. 27.4.2.01	10	100	1000	26.07
Sub-Kegiatan 27.4.2.01.1	19967	7374	36.93	26.07
Keg. 27.4.2.02	10	100	1000	1.28
Sub-Kegiatan 27.4.2.02.1	100	4.91	0	1.28
Keg. 27.4.2.04	100	100	0	0
Sub-Kegiatan 27.4.2.04.2	100	100	0	0



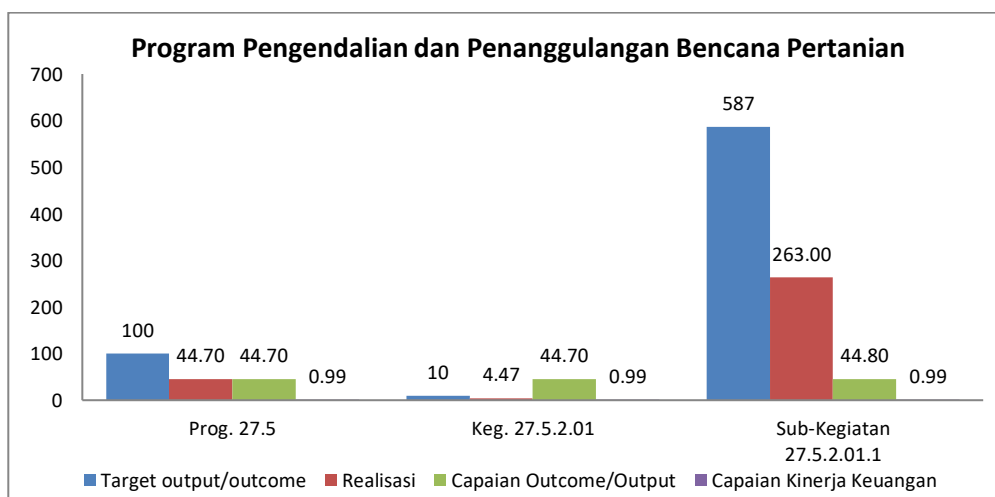
e. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian

Kinerja outcome Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian diukur dengan dua indikator kinerja yaitu Cakupan Luas Pengendalian OPT yang

ditangani. Sampai Triwulan II, capaian kinerja outcome program sebesar 44,70% (Sangat Rendah). Sedangkan kinerja keuangan program mencapai 0,99% (Sangat Rendah). Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian didukung dengan 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub-kegiatan dengan rata-rata kinerja output kegiatan sebesar 44,70% (Sangat Rendah) dan rata-rata kinerja keuangan sebesar 0,99% (Sangat Rendah). Faktor penghambat capaian kinerja keuangan disebabkan oleh adanya wabah Pandemi Covid-19 yang mengakibatkan Rencana kerja reformasi birokrasi yang telah disusun belum sepenuhnya dapat dilaksanakan dengan Secara optimal.

Tabel 2.7. Capaian kinerja outcome/output pada Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian adalah sebagaimana gambar di bawah ini

	Target output/outcome	Realisasi	Capaian Outcome/Output	Capaian Kinerja Keuangan
Prog. 27.5	100	44.70	44.70	0.99
Keg. 27.5.2.01	10	4.47	44.70	0.99
Sub-Kegiatan 27.5.2.01.1	587	263.00	44.80	0.99

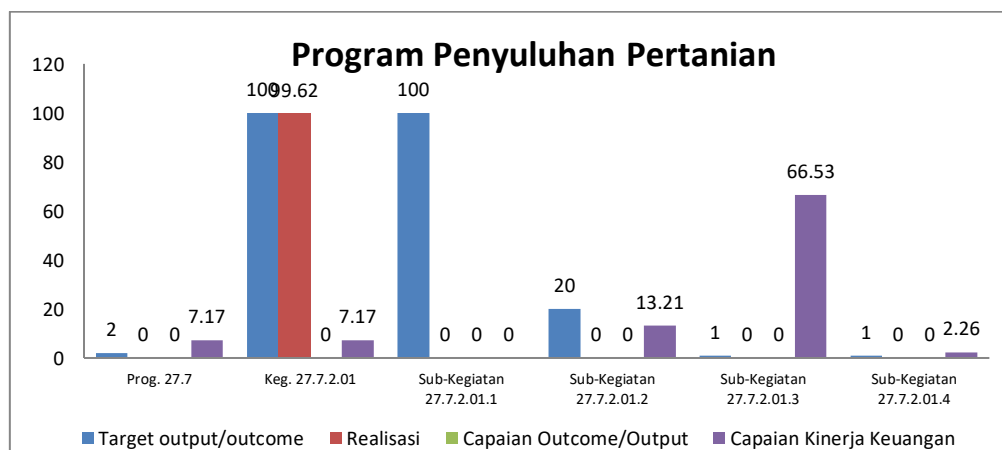


f. Program Penyuluhan Pertanian

Kinerja outcome Program Penyuluhan Pertanian diukur dengan indikator kinerja yaitu Jumlah SDM Pertanian Berprestasi di Tingkat Provinsi. Sampai Triwulan II, capaian kinerja outcome program sebesar 0,00% (Sangat Rendah). Sedangkan kinerja keuangan program mencapai 7,17% (Sangat Rendah). Program Penyuluhan Pertanian didukung dengan 1 (satu) kegiatan dan 4 (empat) sub-kegiatan dengan rata-rata kinerja output kegiatan sebesar 0,00% (Sangat Rendah) dan rata-rata kinerja keuangan sebesar 7,17% (Sangat Rendah). Faktor penghambat capaian kinerja keuangan disebabkan oleh adanya wabah Pandemi Covid-19 yang mengakibatkan Rencana kerja reformasi birokrasi yang telah disusun belum sepenuhnya dapat dilaksanakan dengan Secara optimal.

Tabel 2.8. Capaian kinerja outcome/output pada Program Penyuluhan Pertanian adalah sebagaimana gambar di bawah ini:

	Target output/outcome	Realisasi	Capaian Outcome/Output	Capaian Kinerja Keuangan
Prog. 27.7	2	0	0	7.17
Keg. 27.7.2.01	100	99.62	0	7.17
Sub-Kegiatan 27.7.2.01.1	100	0	0	0
Sub-Kegiatan 27.7.2.01.2	20	0	0	13.21
Sub-Kegiatan 27.7.2.01.3	1	0	0	66.53
Sub-Kegiatan 27.7.2.01.4	1	0	0	2.26



2.2. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Dinas Pertanian

Keberhasilan pelaksanaan tugas-tugas Dinas sangat dipengaruhi oleh lingkungan strategis organisasi, berupa lingkungan internal maupun lingkungan eksternal yang saling terkait (berinteraksi) dalam proses penyelesaian dan penyelenggaraan pembangunan.

Adapun isu-isu penting/permasalahan-permasalahan yang ada terkait dengan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian Kabupaten Klungkung antara lain :

1. Faktor internal :

- a. Kualitas sumberdaya manusia (SDM) aparatur belum optimal seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kurangnya penyerapan inovasi, kreativitas pola pikir holistik terkait dengan peningkatan kompetensinya.
- b. Pelayanan yang diberikan belum optimal dikarenakan komposisi, kuantitas dan kualifikasi pendidikan aparatur masih belum seimbang dan belum sesuai di beberapa posisi jabatan.

2. Faktor eksternal

a. Anomali (perubahan) iklim

Pengalaman menunjukkan bahwa beberapa tahun terakhir kondisi iklim semakin sulit diprediksi. Anomali iklim (berupa banjir/kekeringan) sulit diperkirakan dengan tepat, baik berupa kapan terjadinya maupun intensitasnya. Gangguan anomali iklim tersebut erat kaitannya dengan gagal panen dan perkembangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT), yang sampai saat ini belum dapat dikendalikan secara optimal. kondisi cuaca yang tidak mendukung dapat meningkatkan serangan hama atau penyakit seperti tikus, tungro dan blast. Gangguan OPT tersebut pada akhirnya akan mengakibatkan penurunan produksi (baik kualitas maupun kuantitas) serta berimbas pada pendapatan petani.

Kondisi iklim dipengaruhi oleh curah hujan, hari hujan dan distribusi hari hujan. Kondisi iklim sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan kegiatan penanaman

komoditas palawija, sayuran dan buah-buahan, karena hujan yang tidak merata di beberapa daerah bahkan pada periode bulan tertentu yang biasanya hujan, justru tidak turun hujan. Kondisi ini tentunya juga akan mempengaruhi ketersediaan bahan pakan dan pakan hijauan serta peningkatan harga pakan. Perubahan iklim akan sangat berpengaruh pada produksi tanaman pangan (padi, jagung, kedelai) yang limbahnya digunakan sebagai pakan serta produksi hijauan pakan ternak. Pakan yang berkualitas akan meningkatkan produksi pangan asal ternak (daging, telur dan susu) serta kesehatan ternak itu sendiri. Selain itu ketidakstabilan iklim seperti cuaca ekstrim, menjadi salah satu penyebab merebaknya penyakit hewan disamping pengelolaan, pemeliharaan dan cara beternak yang kurang intensif.

b. Penerapan teknologi belum optimal

Sampai saat ini aplikasi teknologi di tingkat petani terutama dalam budidaya pertanian, panen dan pasca panen belum optimal (masih parsial), yang berdampak pada belum tercapainya tingkat produktivitas hasil sesuai dengan potensi yang ada. Terbatasnya penerapan teknologi dalam mengembangkan varietas hortikultura/pemanfaatan bibit unggul juga belum optimal.

Penerapan teknologi pada subsektor peternakan juga belum optimal terutama pada pengolahan pakan dan pengembangan bibit unggul ternak. Selain terbatasnya pemanfaatan teknologi, masih banyaknya pemotongan ternak unggul produktif menjadi salah satu faktor yang menghambat pengembangan bibit ternak unggul. Pada umumnya, penerapan teknologi yang belum optimal ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya :

1. Rata-rata petani berusia lanjut sehingga adopsi teknologi sangat lambat;
2. Sebagian besar petani kurang yakin dampak dari penerapan teknologi terhadap peningkatan produktivitas dan produksi;
3. Keterbatasan akses petani terhadap permodalan dan sumber informasi serta masih tingginya suku bunga usaha tani;
4. Lemahnya kapasitas dan kelembagaan petani sehingga petani belum mempunyai posisi tawar yang kuat

c. Degradasi sumberdaya lahan/penurunan kualitas lahan

Kualitas kesuburan tanah menjadi menurun dikarenakan penggunaan pupuk kimiawi secara terus menerus, alih fungsi lahan, pola tanam yang salah dan penggunaan pestisida kimia. Langkah penanganan untuk mengatasi penurunan kualitas lahan dapat melalui pemanfaatan produk bioteknologi seperti pupuk dan pestisida hayati yang mengandung mikroba bersifat ramah lingkungan serta pemanfaatan pupuk dan pestisida organik/hayati.

d. Alih fungsi lahan

Sumberdaya lahan dari tahun ke tahun terus mengalami alih fungsi. Alih fungsi justru terjadi pada lahan-lahan sawah yang subur, sementara upaya perluasan areal tidak memungkinkan lagi. Terjadinya alih fungsi lahan sawah berdampak pada penyediaan pangan tahun berikutnya. Alih fungsi lahan sawah ke non pertanian di Kabupaten Klungkung sampai tahun 2021 seluas 155 Ha, sedangkan lahan perkebunan mengalami alih fungsi lahan seluas 37, 2 Ha. Lahan tersebut beralih fungsi menjadi bangunan TOSS (perumahan/hotel/vila) jalan dan menjadi lahan pangan/tanaman tahunan.

e. Status dan luas kepemilikan lahan petani sangat terbatas

Luas kepemilikan lahan sawah relatif kecil yaitu rata-rata 0,30 hektar dan sebagian besar petani berstatus sebagai petani penggarap dan buruh tani. Kondisi ini mengakibatkan pengelolaan usaha tani menjadi kurang efisien sehingga berpengaruh terhadap pendapatan petani. Disamping itu dengan produksi pertanian yang bersifat musiman maka keadaan ini akan berpengaruh terhadap fluktuasi harga di pasaran, disamping itu juga menyebabkan kurang kondusif bagi industri/usaha pengolahan hasil pertanian yang memerlukan jaminan kontinuitas jumlah dan waktu pemasokan bahan baku. Luas lahan yang sempit juga berpengaruh terhadap daya tampung ternak. Beternak hanya sebagai usaha sampingan dan belum digarap dengan baik/ penerapan dengan cara beternak yang baik (Good Breeding Practice)

f. Kurangnya ketersediaan infrastruktur dan sarana prasarana pertanian

Sarana prasarana yang masih dirasakan menghambat proses produksi diantaranya kerusakan jaringan irigasi, jalan usaha tani, jalan produksi serta cubang/embung khususnya dilahan kering yang berfungsi sebagai cadangan untuk menampung air/mengairi lahan dalam usaha tani dan sumber air minum ternak pada saat terjadi musim kemarau. Pembangunan cubang/embung terutama di Pulau Nusa Penida yang merupakan daerah perbukitan tandus dan kering.

g. Kegiatan usaha masih terfokus pada aspek produksi

Saat ini kegiatan usaha tani/ternak masih terfokus pada aspek produksi (on farm), sementara kegiatan usaha diluar produksi (off farm) belum banyak berkembang dan tertangani. Hal ini antara lain karena kemampuan Sumber Daya Manusia (petani, peternak, aparatur, stake holders) rata-rata belum memadai, jika dibandingkan dengan perkembangan IPTEK yang sangat dinamis

h. Menurunnya minat generasi muda menjadi petani/peternak

Profesi sebagai petani/peternak adalah pilihan prioritas yang tidak diminati, hal ini dikarenakan lapangan kerja lain menyajikan pendapatan yang lebih besar dan pasti.

Terlepas dari isu-isu strategis /permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pertanian Kabupaten Klungkung dalam mencapai tujuan dan sasaran berikut adalah potensi yang dimiliki dalam meningkatkan/mendukung pembangunan pertanian serta tantangan kedepan yang dihadapi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Pertanian yakni :

- a. Adanya komitmen dari pemerintah daerah, provinsi dan pusat untuk mengembangkan sektor pertanian diantaranya dengan memberikan anggaran baik dari APBD maupun APBN.
- b. Potensi pertanian Kabupaten Klungkung cukup besar dilihat dari luas lahan yaitu lahan sawah seluas 3.777 Ha, lahan tegal/kebun seluas 4.276 Ha dan perkebunan seluas 5.967 Ha. Dengan potensi ketersediaan lahan pertanian yang dimiliki dan

pemanfaatan yang optimal maka akan meningkatkan produksi komoditas tanaman pangan. Terlebih lagi ditunjang oleh Inovasi dan introduksi teknologi pertanian, sarana dan prasarana pertanian yang memadai misalnya seperti; embung, Jalan Usaha Tani, ketersediaan pupuk, irigasi air dan peralatan pertanian lainnya.

- c. Ternak besar yang banyak dibudidayakan di Kabupaten Klungkung adalah sapi potong. Populasi sapi potong tahun 2021 sebanyak 42.745 ekor dimana lebih dari 50 persen diternakkan di Nusa Penida. Oleh karenanya Nusa Penida ditetapkan sebagai wilayah sumber bibit sapi bali dan kawasan peternakan sapi bali. Dalam upaya pengembangan usaha peternakan, peranan dari pusat kesehatan hewan juga sangat diperlukan dalam usaha pelayanan kesehatan hewan guna menunjang kegiatan peternakan.
- d. Permintaan pasar terhadap produk pertanian cukup tinggi yang diiringi dengan meningkatnya kebutuhan terhadap produk pangan. Tantangan global di masa mendatang adalah bagaimana menyediakan pangan bagi penduduk yang jumlahnya semakin meningkat. Sektor pertanian menjadi sangat penting untuk dapat memproduksi pangan dan menjamin ketersediaan pangan dan gizi cukup bagi penduduk.
- e. Dinas Pertanian Kabupaten Klungkung sejak tahun 2016 menjalin MOU dengan KUD dan Subak dalam mendistribusikan beras lokal ke seluruh aparaturnya pemerintahan Kabupaten Klungkung. Dengan jargonnya “Beli mahal jual murah” tentunya dapat memberikan pendapatan lebih bagi petani.
- f. Tantangan bagi Dinas Pertanian dan para stakeholder di sektor pertanian untuk menjaga produksi pangan secara kuantitas dan kualitas lingkungan tetap baik yakni dengan meminimalisir penggunaan pupuk dan pestisida anorganik/kimiawi dengan pupuk dan pestisida organik/hayati sehingga hasil tanaman pangan yang dikonsumsi manusia aman dan tidak merusak lingkungan.

Dengan berdasarkan pada isu-isu strategis, potensi dan peluang yang dimiliki, maka strategi/arah kebijakan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.9. Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Pertanian Kabupaten Klungkung

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya produksi pertanian	Meningkatnya produktivitas pertanian	- Produktivitas padi (kw/ha)	- Penguatan kelembagaan petani dengan meningkatkan sumber daya petani dan kualitas tenaga pendamping petani.	- Mencetak petani yang berprestasi dan penyuluh pertanian berprestasi
		- Produktivitas jagung (kw/ha)	- Peningkatan ketahanan pangan melalui penerapan peningkatan teknologi budidaya pertanian ramah lingkungan dan pengembangan pemasaran hasil produksi pertanian	- Pemanfaatan benih/bibit varietas unggul, pengendalian hama penyakit tanaman, promosi produk unggulan pertanian serta menjalin kerjasama dengan koperasi dalam pemasaran beras lokal
		- Produktivitas kedelai (kw/ha)		
		- Produktivitas Cabai (kw/ha)	- Peningkatan produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	- Penyediaan sarana produksi pertanian melalui penggunaan pupuk sesuai 6 tepat, fasilitasi asuransi pertanian, peningkatan pemanfaatan alat mesin pertanian, perbaikan infrastruktur pertanian dan pengkajian ahli fungsi lahan pertanian
		Jumlah populasi ternak sapi (ekor)		
			- Peningkatan produksi peternakan	- Peningkatan pemanfaatan teknologi inseminasi buatan (IB), pengembangan pelaku agribisnis peternakan dan ketersediaan pakan ternak yang berkualitas dengan pemanfaatan teknologi peternakan tepat guna
			- Peningkatan pelayanan kesehatan ternak/hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	- Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak/hewan, pemusnahan ternak/hewan yang terjangkit penyakit menular serta pemeriksaan bahan pangan asal hewan yang aman, sehat, utuh dan halal
			- Pengendalian pembangunan pertanian dalam lingkup Dinas Pertanian	- Meningkatkan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja program/kegiatan yang sudah berjalan dan didukung oleh data statistik produksi pertanian yang akurat.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Tujuan Dan Sasaran

3.1.1. Tujuan

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan. Penetapan tujuan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan. Dinas Pertanian Kabupaten Klungkung memiliki tujuan **“Meningkatnya Produksi Pertanian”** dengan indikator kinerja adalah produksi padi (ton), produksi jagung (ton), produksi kedelai (ton) dan produksi daging sapi (kg).

Tabel 3.1. Tujuan Dinas Pertanian Tahun 2021

Tujuan		Cara pengukuran	Target 2021
Uraian	Indikator kinerja		
Meningkatnya produksi pertanian	Produksi padi (ton)	produktivitas (kw/ha) x luas panen (ha)	30,892
	Produksi jagung (ton)	produktivitas (kw/ha) x luas panen (ha)	5,896
	Produksi kedelai (ton)	produktivitas (kw/ha) x luas panen (ha)	232
	Produksi cabai (ton)	produktivitas (kw/ha) x luas panen (ha)	4,360
	Produksi daging Sapi (Kg)	total pemotongan x 212 kg. Keterangan : (total pemotongan = sapi tercatat + tidak tercatat); (tidak tercatat = 6,93% x tercatat); (untuk kenaikan tiap tahun = kondisi awal x 1% + kondisi awal)	149.011

3.1.2. Sasaran

Sasaran adalah menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai. Untuk mencapai tujuan Dinas Pertanian Kabupaten Klungkung menetapkan sasaran yaitu **Meningkatnya produktivitas pertanian** dengan indikatornya : produktivitas padi (kw/ha), produktivitas jagung (kw/ha), produktivitas kedelai (kw/ha) dan jumlah populasi ternak sapi (ekor).

Tabel 3.2. Sasaran Dinas Pertanian Tahun 2021

Sasaran		Cara pengukuran	Target 2021
Uraian	Indikator kinerja		
Meningkatnya produktivitas pertanian	produktivitas padi (kw/ha)	Sampel ubinan diambil bersama petugas BPS, dengan menghitung berat gabah kering panen per satuan luas (2,5 m x 2,5 m), kemudian dikonversi ke satuan kw/ha	62,21
	produktivitas jagung (kw/ha)	Sampel ubinan yang dihitung adalah berat tongkol kering panen per satuan luas (2,5 m x 2,5 m) kemudian dikonversi ke satuan kw/ha	32,39
	produktivitas kedelai (kw/ha)	Sampel ubinan yang dihitung adalah biji kering panen per satuan luas (2,5 m x 2,5 m) kemudian dikonversi ke satuan kw/ha	13,21
	Produksi cabai (ton)	Produksi habis dipanen dibagi luas panen habis (kw/Ha)	29,25
	Jumlah populasi ternak sapi (ekor)	Jumlah ternak yang dipelihara rumah tangga pada saat sensus data (populasi awal). Kemudian populasi awal x 0,5% + populasi awal untuk kenaikan populasi ternak sapi tiap tahun	43.112

3.2. Program dan Kegiatan

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang akan dilaksanakan atau kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan suatu hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Instansi Pemerintah. Kegiatan merupakan segala sesuatu yang harus dilakukan dalam merealisasikan program. Kegiatan mencerminkan strategi yang konkrit untuk diimplementasikan dengan sebaik-baiknya dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran.

Sejalan dengan Visi dan Misi Kabupaten Klungkung tahun 2019-2023 yaitu **“Terwujudnya Klungkung yang Unggul dan Sejahtera”**, dan sesuai dengan Misi ke 4 RPJMD Kabupaten Klungkung **“Meningkatkan perekonomian yang berbasis kerakyatan dengan mengedepankan konsepsi kemitraan”**, maka Dinas Pertanian Kabupaten Klungkung pada Tahun 2021 melaksanakan 6 program, 14 kegiatan dan 30 sub-kegiatan.

Tabel 3.3. Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan sub-kegiatan Dinas Pertanian Kabupaten Klungkung dalam APBD Tahun 2021 dan Rencana Perubahan Tahun 2021

Tabel 3.3. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Pertanian Kabupaten Klungkung dalam APBD Tahun 2021 dan Rencana Perubahan Tahun 2021

Kode					Nama	Indikator Kinerja	DPA Tahun 2021			Renja Tahun 2021 Perubahan			Bertambah (Berkurang)	Catatan Penting	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)			
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					18,404,903,718.00			15,748,446,370.00	(2,656,457,348.00)	
3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN					18,404,903,718.00			15,748,446,370.00	(2,656,457,348.00)	
3	27	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Remormasi Birokrasi	Dinas Pertanian	18 point	12,782,310,474.00	Dinas Pertanian	18 point	11,272,252,770.00	(1,510,057,704.00)		
3	27	1	2		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase hasil evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti	Dinas Pertanian	100%	1,820,000.00	Dinas Pertanian	100%	1,820,000.00	-		
3	27	1	2	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah Tepat Waktu	Dinas Pertanian	12 dokumen	980,000.00	Dinas Pertanian	12 dokumen	980,000.00	-	Pengurangan : -	
3	27	1	2	5	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Laopran Evaluasi Perangkat Daerah	Dinas Pertanian	9 Dokumen	840,000.00	Dinas Pertanian	9 Dokumen	840,000.00	-	Pengurangan : -	
3	27	1	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersusunnya laporan penatausahaan keuangan perangkat daerah tepat waktu	Dinas Pertanian	3 Laporan	11,831,327,045.00	Dinas Pertanian	3 Laporan	10,375,756,235.00	(1,455,570,810.00)		
3	27	1	2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya Kebutuhan Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Pertanian	100%	11,771,355,045.00	Dinas Pertanian	100 %	10,365,594,235.00	(1,405,760,810.00)	Pengurangan : Gaji, Tunjangan, TPP	

3	27	1	2	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersusunnya Jumlah Laporan Keuangan Bulanan dan Semesteran Tepat Waktu	Dinas Pertanian	14 Laporan	59,972,000.00	Dinas Pertanian	14 Laporan	10,162,000.00	(49,810,000.00)	Pengurangan : Perdin ke luar daerah
3	27	1	2		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat disiplin aparatur	Dinas Pertanian	95%	1,260,000.00	Dinas Pertanian	95%	1,260,000.00	-	
3	27	1	2	11	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Cakupan pemenuhan layanan administrasi kepegawaian tepat waktu	Dinas Pertanian	85%	1,260,000.00	Dinas Pertanian	85%	1,260,000.00	-	Pengurangan : -
3	27	1	2		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase surat yang diarsipkan sesuai klasifikasi	Dinas Pertanian	100%	947,903,429.00	Dinas Pertanian	100%	893,416,535.00	(54,486,894.00)	
3	27	1	2	1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	Dinas Pertanian	85%	947,203,429.00	Dinas Pertanian	85%	892,716,535.00	(54,486,894.00)	Pengurangan : Sesajen, Pembangunan Garase, Spanduk, Pemeliharaan Mesin Absensi, Perdin
3	27	1	2	13	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Cakupan pemenuhan layanan jasa surat menyurat	Dinas Pertanian	100%	700,000.00	Dinas Pertanian	100%	700,000.00	-	Pengurangan :
3	27	2			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Cakupan Pemenuhan Sarana Pertanian	Dinas Pertanian	100%	1,453,142,096.00	Dinas Pertanian	100%	992,943,896.00	(460,198,200.00)	
3	27	2	2		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Persentase Luas Tanaman yang Menerapkan Teknologi Pertanian	Dinas Pertanian	50,28 %	544,688,352.00	Dinas Pertanian	50,28 %	145,302,952.00	(399,385,400.00)	
3	27	2	2	1	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Persentase penerapan teknologi budidaya tanaman	Dinas Pertanian	49,88 %	396,785,900.00	Dinas Pertanian	49,88 %	46,147,500.00	(350,638,400.00)	Pengurangan : Bahan Kimia, Bibit Tanaman, Bahan Lainnya, Makmin, Perdin ke Luar daerah
3	27	2	2	2	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Persentase kelompok tani yang menerapkan teknologi pasca panen	Dinas Pertanian	50%	147,902,452.00	Dinas Pertanian	50 %	99,155,452.00	(48,747,000.00)	Pengurangan : Bahan Lainnya, Makmin, Honor Narasumber, Perdin

						Persentase KWT yang melaksanakan pengolahan hasil pertanian		50%			50%			
3	27	2	2			Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase induk sapi (akseptor) yang menggunakan teknologi IB	Dinas Pertanian	58%	908,453,744.00	Dinas Pertanian	58%	847,640,944.00	(60,812,800.00)
3	27	2	2	1		Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Jumlah Kelompok Ternak yang Melaksanakan Pembibitan Sapi	Dinas Pertanian	10 kelompok	831,629,744.00	Dinas Pertanian	10 kelompok	806,400,944.00	(25,228,800.00) Pengurangan : Bahan lainnya, Alat Tulis, Pakain kerja lapangan, Perdin
3	27	2	2	2		Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	Jumlah Kelompok yang Menerapkan Teknologi Pakan Ternak	Dinas Pertanian	10 kelompok	76,824,000.00	Dinas Pertanian	6 kelompok	41,240,000.00	(35,584,000.00) Pengurangan : Bahan lainnya, Bahan Cetak, Makmin, Jasa Narasumber, Perdin
3	27	3				PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Cakupan Pemenuhan Prasarana Pertanian	Dinas Pertanian	100%	2,471,159,356.00	Dinas Pertanian	100%	2,825,511,356.00	354,352,000.00
3	27	3	2			Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Penyediaan Prasarana Pertanian	Dinas Pertanian	100%	187,342,904.00	Dinas Pertanian	100%	149,600,904.00	(37,742,000.00)
3	27	3	2	2		Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	Persentase Terlayannya Permohonan Kajian Alih Fungsi Lahan	Dinas Pertanian	100%	125,680,452.00	Dinas Pertanian	100 %	120,980,452.00	(4,700,000.00) Pengurangan : Makmin
3	27	3	2	3		Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Cakupan pemenuhan pupuk bersubsidi	Dinas Pertanian	85%	61,662,452.00	Dinas Pertanian	85 %	28,620,452.00	(33,042,000.00) Pengurangan : Makmin, Perdin ke Luar Daerah
							Jumlah ternak sapi yang dijamin Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau		200 ekor			200 ekor		
							Persentase luas tanam yang dijamin Asuransi Usaha Tani Padi		60%			60%		

3	27	3	2		Pembangunan Prasarana Pertanian	Persentase prasarana pertanian yang dibangun dan dipelihara	Dinas Pertanian	100%	2,222,516,000.00	Dinas Pertanian	100%	2,648,040,000.00	425,524,000.00	
3	27	3	2	1	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Persentase Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani	Dinas Pertanian	100%	84,480,000.00	Dinas Pertanian	100 %	199,120,000.00	114,640,000.00	Pengurangan : Bahan lainnya Penambahan : Belanja Hibah tanah dangkal
3	27	3	2	2	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Persentase Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Dinas Pertanian	100%	136,390,000.00	Dinas Pertanian	100%	-	(136,390,000.00)	Pengurangan : Belanja Hibah tanah dangkal
3	27	3	2	3	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Persentase Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Dinas Pertanian	100%	1,481,754,000.00	Dinas Pertanian	100 %	1,464,920,000.00	(16,834,000.00)	Pengurangan : Perdin ke luar daerah
3	27	3	2	4	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	Persentase Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	Dinas Pertanian	100%	120,000,000.00	Dinas Pertanian	100%	120,000,000.00	-	Pengurangan : -
3	27	3	2	5	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Long Storage	Persentase Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Long Storage	Dinas Pertanian	100%	120,000,000.00	Dinas Pertanian	100%	120,000,000.00	-	Pengurangan : -
3	27	3	2	6	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air	Persentase Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air	Dinas Pertanian	100%	-	Dinas Pertanian	100%	-	-	Pengurangan : -
3	27	3	2	8	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya	Persentase Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	Dinas Pertanian	100%	257,750,000.00	Dinas Pertanian	100 %	739,000,000.00	481,250,000.00	Pengurangan : - Penambahan : Pengawasan BPP, Perbaikan BPP, Perdin dari Dana DAK, Belanja Modal Dana DAK

3	27	3	2	9	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Persentase Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Dinas Pertanian	100%	22,142,000.00	Dinas Pertanian	100 %	5,000,000.00	(17,142,000.00)	Pengurangan : Makmin, Jasa Narasumber, Perdin, Transport Peserta Pelatihan
3	27	3	2		Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Peningkatan Populasi Sapi	Dinas Pertanian	0,50 %	61,300,452.00	Dinas Pertanian	0,50 %	27,870,452.00	(33,430,000.00)	
3	27	3	2	1	Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Jumlah Kelompok Agribisnis Peternakan	Dinas Pertanian	15 kelompok	61,300,452.00	Dinas Pertanian	7 kelompok	27,870,452.00	(33,430,000.00)	Pengurangan : Bahan lainnya, Bahan Cetak, Makmin, Jasa Narasumber, Perdin
3	27	4			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Angka Kesakitan Hewan	Dinas Pertanian	10%	543,127,356.00	Dinas Pertanian	10%	364,744,356.00	(178,383,000.00)	
3	27	4	2		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Hewan/Ternak yang Memperoleh Pelayanan Kesehatan Hewan	Dinas Pertanian	10%	301,322,356.00	Dinas Pertanian	10%	191,684,356.00	(109,638,000.00)	
3	27	4	2	1	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Hewan/Ternak yang Memperoleh Pelayanan Kesehatan Hewan	Dinas Pertanian	19.967 ekor	301,322,356.00	Dinas Pertanian	19.967 ekor	191,684,356.00	(109,638,000.00)	Pengurangan : Bahan Lainnya, Bahan Cetak, Obat-obatan, Makmin, Perdin
3	27	4	2		Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Hewan/Ternak Terindikasi Berpenyakit Zoonosis yang diberantas	Dinas Pertanian	10%	195,322,000.00	Dinas Pertanian	10%	147,250,000.00	(48,072,000.00)	

3	27	4	2	1	Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	Persentase Hewan/Ternak yang Terindikasi Berpenyakit Hewan	Dinas Pertanian	100%	195,322,000.00	Dinas Pertanian	100 %	147,250,000.00	(48,072,000.00)	Pengurangan : Bahan Kimia, Bahan Cetak, Obat-obatan, Perdin
3	27	4	2		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Cakupan Produsen Pangan Hewani yang dipantau	Dinas Pertanian	100%	46,483,000.00	Dinas Pertanian	100%	25,810,000.00	(20,673,000.00)	
3	27	4	2	2	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Persentase Produsen Pangan Hewani yang dipantau	Dinas Pertanian	100%	46,483,000.00	Dinas Pertanian	100 %	25,810,000.00	(20,673,000.00)	Pengurangan : Bahan Lainnya, Bahan Cetak, Obat-obatan, Makmin, Perdin
3	27	5			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Cakupan Luas Pengendalian OPT yang ditangani	Dinas Pertanian	100%	444,295,500.00	Dinas Pertanian	100%	188,137,250.00	(256,158,250.00)	
3	27	5	2		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian yang dilakukan	Dinas Pertanian	10%	444,295,500.00	Dinas Pertanian	10%	188,137,250.00	(256,158,250.00)	
3	27	5	2	1	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Luas Pengendalian OPT yang ditangani	Dinas Pertanian	587 ha	444,295,500.00	Dinas Pertanian	587 ha	188,137,250.00	(256,158,250.00)	Pengurangan : Bahan Kimia, Bibit Tanaman, Bahan Lainnya, Makmin, Perdin ke Luar daerah
3	27	7			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Jumlah SDM Pertanian Berprestasi di Tingkat Provinsi	Dinas Pertanian	2 kandidat	710,868,936.00	Dinas Pertanian	2 kandidat	104,856,742.00	(606,012,194.00)	
3	27	7	2		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Persentase Terlaksananya Penyuluhan Pertanian	Dinas Pertanian	100%	710,868,936.00	Dinas Pertanian	100%	104,856,742.00	(606,012,194.00)	
3	27	7	2	1	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Persentase Penyuluh dengan NEM baik	Dinas Pertanian	100%	20,227,000.00	Dinas Pertanian	100 %	5,260,000.00	(14,967,000.00)	Pengurangan : Bahan Cetak, Makmin, Jasa Narasumber, Perdin ke luar daerah

3	27	7	2	2	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Persentase peningkatan kelas kemampuan kelompok	Dinas Pertanian	20%	629,684,000.00	Dinas Pertanian	20 %	35,910,000.00	(593,774,000.00)	Pengurangan : DAK Non Fisik, Perbaikan dan Pengawasan BPP, Perdin Dana DAK, Penghargaan, Belanja Modal Dana DAK, Perdin ke luar daerah
3	27	7	2	3	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Tersedianya Data Sarana Prasarana Penyuluhan	Dinas Pertanian	1 dokumen	12,002,000.00	Dinas Pertanian	1 dokumen	45,860,000.00	33,858,000.00	Pengurangan : Perdin ke luar daerah Penambahan : DAK Non Fisik
3	27	7	2	4	Pembentukan Badan Usaha Milik Petani	Jumlah penumbuhan badan usaha milik petani	Dinas Pertanian	1 Kelompok	48,955,936.00	Dinas Pertanian	1 Kelompok	17,826,742.00	(31,129,194.00)	Pengurangan : Jasa THLTB 11 OH, Perdin ke luar daerah
TOTAL ANGGARAN									18,404,903,718.00			15,748,446,370.00	(2,656,457,348.00)	

BAB IV

P E N U T U P

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Pertanian Kabupaten Klungkung Tahun 2021 ini merupakan rencana kerja perubahan dari renja tahunan yang disusun berdasarkan Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Klungkung Tahun 2019 - 2023 dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi serta target dan Sasaran Pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Tahun 2021. Rencana Kerja Perubahan Dinas Pertanian Kabupaten Klungkung sebagai bahan dalam pelaksanaan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD Perubahan Tahun 2021 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun berjalan (Januari - Juni 2021).

Dengan adanya Rencana Kerja Perubahan Dinas Pertanian Kabupaten Klungkung Tahun 2021, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari tujuan dan sasaran Instansi diharapkan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan, dengan OPD yang membidangi fungsi lain.

BUPATI KLUNGKUNG,

I NYOMAN SUWIRTA

LAMP IRAN